

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faria, and Yocelik. "The Interrelationship Between Tax Policy and Tax Administration." In *Tax Policy Handbook*, edited by Parthasarathi Shome. Washington DC: Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, 1995.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Hans, Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa, 2007.
- Holmes, Kevin. *The Concept of Income a Multi-Disciplinary Analysis*. Amsterdam: IBFD Publications BV, 2001.
- Ilyas, Wirawan B., and Rudi Suhartono. *Panduan Komprehensif Dan Praktis: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Lapidoth, Arye. *Selected Monographs on Taxation*. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 1977.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nitisemito, Alex S. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rahardjo, Soemarso Slamet. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Rosdiana, Haula, and Edi Slamet Irianto. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co. LTD. 1776
- Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sumardjono, Maria Sri Wulan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. 5th ed. Jakarta: Indeks, 2017.\
- Utrecht dalam Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.
- Weber, Dennis. *Tax Law, Design, and Drafting*. Amsterdam: University van Amsterdam, 2014.

## **B. Jurnal dan Tesis**

Alhamra, Insan Thariq, and Arvie Johan. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Penyerahan Atas Aset Yang Diambil Alih (AYDA).”* Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Ariffin, Melissa, and Tunjung Herning Sitabuana. *“Sistem Perpajakan Di Indonesia.” Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022*, Jakarta, 2022.

Christians, Allison & Yariv Brauner. *“The Meaning of ‘Enterprise,’ ‘Business,’ and ‘Business Profits’ under Tax Treaties and Domestic Tax Law”* (2011) 11161 U Wis Legal Studies.

Setyorini. *“Analisis Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Fixed Rebate Yang Diterima Perusahaan Ritel (Studi Kasus PT ABC).”* Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, 2017.

Sinaga, Agustinus Basrih. *“Analisis Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Participating Interest Tidak Langsung Yang Mengandung Transaksi Pengalihan Piutang Oleh Kontraktor Sektor Hulu Migas (Studi Kasus Putusan Ma Nomor 4003/B/Pk/Pjk/2019) .”* Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

## **C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01260/KEB/WPJ.19/2018, 2018.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061/B/PK/PJK/2022, 2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 B/PK/PJK/2007, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 B/PK/PJK/2017, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2182/B/PK/PJK/2017, 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 175/B/PK/PJK/2015, 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419/B/PK/Pjk/2019, 2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1641/B/PK/Pjk/2019, 2019.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002727.12/2019/PP/M.XIB Tahun  
2020, 2020.
- Putusan Pengadilan Pajak Put-083392.12/2011/PP/M.VB Tahun 2018, 2018.
- Putusan Pengadilan Pajak Put-60738/PP/M.XIIIB/12/2015, 2015.
- Putusan Pengadilan Pajak Put-000940.12/2019/PP/M.VA Tahun 2020, 2020.
- Putusan Pengadilan Pajak Put.46356/PP/M.XV/12/2013, 2013.
- Putusan Pengadilan Pajak Put.61374/PP/M.XIIIA/12/2015, 2015.
- Putusan Pengadilan Pajak Put. 43939/PP/ M.VI/15/2013, 2013.
- Putusan Pengadilan Pajak PUT-076709.12/2010/PP/M.VB Tahun 2018, 2018.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 24/PJ/2018 Tentang Perlakuan  
Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan  
Dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli, 2018.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S – 239/Pj.312/1996 Tentang Potongan  
Dan Atau Incentive Bagi Pelanggan, 1996.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00006/203/14/092/17 Yang Telah Dibetulkan Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-00068/NKEBAVPJ.19/KP.02/2018, 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **D. Sumber Elektronik**

Advtanmoy. "Ejus dem generis means". <https://advocatetanmoy.com/ejus-dem-generis-means> (diakses 10 September 2025).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. Miliki Kontribusi Signifikan bagi Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Berharap Sektor Retail Jadi Tulang Punggung di Tengah

Ketidakpastian. Jakarta: SIARAN PERS

HM.4.6/118/SET.M.EKON.3/04/2024 (diakses 14 November 2024).

Kurniati, Dian. Dibanding Insentif, Kepastian Sistem Pajak Lebih Penting Bagi

Investor. DDTC News, 15 Februari 2024.

<https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1800591/dibanding-insentif->

[kepastian-sistem-pajak-lebih-penting-bagi-investor](https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1800591/dibanding-insentif-kepastian-sistem-pajak-lebih-penting-bagi-investor) (diakses 6 April

2025).

Primantoro, Agustinus Yoga. 2025. Rupiah Terpuruk Hingga Mendekati Level

Krisis 1998. Kompas, 26 Maret 2025.

<https://www.kompas.id/artikel/hampir-mendekati-level-krisis-1998->

[rupiah-telah-terpuruk-sejak-pandemi-covid-19](https://www.kompas.id/artikel/hampir-mendekati-level-krisis-1998-rupiah-telah-terpuruk-sejak-pandemi-covid-19) (diakses 6 April 2025).

Tempo. World Bank Nilai Indonesia Negara Paling Jelek Pengaturan Pajaknya.

Luhut: Kita Disamakan Dengan Nigeria. Tempo 16 Januari, 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/world-bank-nilai-indonesia-negara->

[paling-jelek-pengaturan-pajaknya-luhut-kita-disamakan-dengan-nigeria-](https://www.tempo.co/ekonomi/world-bank-nilai-indonesia-negara-paling-jelek-pengaturan-pajaknya-luhut-kita-disamakan-dengan-nigeria-)

[1194727](https://www.tempo.co/ekonomi/world-bank-nilai-indonesia-negara-paling-jelek-pengaturan-pajaknya-luhut-kita-disamakan-dengan-nigeria-1194727) (diakses 6 April 2025).